



Judul : Belum ada tambahan anggaran, rehabilitasi hutan bakal terhambat
Tanggal : Senin, 25 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Belum Ada Tambahan Anggaran Rehabilitasi Hutan Bakal Terhambat

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti belum adanya tambahan anggaran untuk pemulihan kawasan hutan di daerah bencana Sumatera. Kondisi ini dinilai menghambat upaya rehabilitasi hutan di sejumlah wilayah rawan bencana.

Alex mengungkapkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan (Kemhut) sejak Februari 2026 hingga kini masih belum direalisasikan pemerintah pusat. Padahal, kebutuhan percepatan pemulihan kawasan hutan di daerah terdampak bencana semakin mendesak.

"Sampai Mei 2026 ini, tambahan anggaran itu masih belum direalisasikan. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana, masih belum bisa dilakukan. Kira-kira, kita ini masih punya hati nurani gak sih membenahi dampak bencana yang telah sebabkan korban jiwa dan kerugian puluhan triliun rupiah," kata Alex saat Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran 2026.

Alex menilai, penanganan kerusakan hutan akibat bencana tidak cukup hanya dengan wacana dan doa. Menurutnya, diperlukan langkah konkret berupa dukungan anggaran agar rehabilitasi kawasan hutan bisa segera dijalankan.

"Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua, berdoa setiap setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus dengan doa saja," tegas Ketua PDIP Sumatera Barat itu.

Berdasarkan data Kemhut tahun 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektare. Angka tersebut menunjukkan luas deforestasi masih lebih besar dibandingkan reforestasi atau pemulihan hutan.

Alex mengingatkan, kerusakan kawasan hutan berpotensi

“

Sampai Mei 2026 ini, tambahan anggaran itu masih belum direalisasikan. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana, masih belum bisa dilakukan. Kira-kira, kita ini masih punya hati nurani gak sih membenahi dampak bencana yang telah sebabkan korban jiwa dan kerugian puluhan triliun rupiah.

ALEX INDRA LUKMAN
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

memperbesar risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2008-2025 menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2008-2013 tercatat 780 kejadian, meningkat menjadi 882 kejadian pada 2014-2019, lalu melonjak menjadi 4.779 kejadian pada periode 2020-2025.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan tambahan anggaran pemulihan hutan agar rehabilitasi kawasan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa segera dilakukan.

"Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya," pungkas Alex.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kementerian Kehutanan tahun 2025 mencapai Rp 5,04 triliun atau 96,29 persen dari pagu efektif sebesar Rp 5,24 triliun.

"Kami terus berupaya memastikan pelaksanaan program berjalan secara teratur, tepat waktu, dan sesuai rekomendasi BPK RI," ungkap Raja Juli. ■ **evu**